



**SUMBER BERITA**

**RABU, 10 APRIL 2019**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Polda Periksa Napi Jalan Tugu Hiu**

**BENGKULU** - Penyidik Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu kemarin pagi (9/4) menjemput salah satu narapidana (napi) korupsi Jalan Tugu Hiu - Kroya yang masih ditahan di Rutan Malabero. Adalah Candra Purnama, PNS PUPR Provinsi Bengkulu, diboyong ke Mapolda Bengkulu untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi Jalan Kepahiang yang sedang disidik.

Diketahui dalam pelaksanaan proyek preservasi rehabilitasi jalan batas Kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang tahun anggaran 2017, Candra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dicegat RB saat menuju ke ruang penyidik Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus, tak sepele katapun keluar dari mulut Candra. Dia menyembunyikan mukanya, dan terus berjalan.

Pemeriksaan terhadap PPK dalam kapasitas saksi itu berlangsung selama 4 jam, mulai pukul 10.00 sampai 14.00 WIB. Dia dicecar penyidik sekitar 50 pertanyaan.

Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes. Pol. Ahmad Tarmizi, MH melalui Kasubdit Tipidkor AKBP. Sandi Arisandi membenarkan tentang pemeriksaan saksi yang merupakan napi korupsi. "Dia kita periksa terkait penyidikan kasus jalan Kepahiang," ujar Sandi.

Dikatakannya, Candra pertama kali diperiksa sebagai saksi sejak kasus ini statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. Namun sebelumnya, dalam proses penyelidikan yang bersangkutan juga sudah pernah dipanggil dan dimintai keterangan. "Kalau

hari ini dia sebagai saksi untuk penyidikan," ujarnya.

Sejauh ini, sambung Sandi, sejak dinaikkan ke tahap penyidikan sudah 29 saksi diperiksa. Masih ada beberapa saksi terkait lainnya yang dalam waktu dekat juga akan diperiksa sembari menunggu keluarnya hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP Bengkulu. Lebih jauh Sandi mengemukakan, penyidik dalam waktu dekat juga akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. "Sebenarnya hasil pemeriksaan ahli sudah ada. Makanya kasus ini berani kami tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Rencananya dalam waktu dekat

kita akan gelar perkara untuk menetapkan tersangka sekaligus hasil resmi audit BPKP belum keluar," jelasnya.

Diusutnya kasus ini sejak penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam pekerjaan proyek preservasi rehabilitasi jalan batas kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang. Pekerjaan dengan nilai pagu Rp 31,6 miliar pada satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu itu diduga telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang terdapat dalam surat perjanjian kerja (kontrak) sehingga menimbulkan kerugian negara.(tew)